Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 1, Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i1.4018

Transformasi Smart City Dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

Muhlis Hafel[1], Julfi Jamil[2]
[1]. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
[2]. Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Bumi Hijrah Tidore, Indonesia
[1]muhlis@ecampus.ut.ac.id, [2]julfijamil1978@gmail.com

Abstract

The development of information technology encourages local governments to implement electronic-based governance. The South Halmahera Regency Government has launched an E-Government program and is now even transforming the Smart City program to encourage the acceleration of E-Government Implementation. This research aims to analyze the situation and conditions of E-Government implementation through the Smart City transformation program. This research uses a qualitative approach to analyze and understand public phenomena in the Smart City transformation program. Data analysis uses the spiral technique through data collection stages in the form of data interviews, observation and documentation, data organizing stage, data marking and meaning stage, and data description and classification stage. Based on data analysis, the South Halmahera Regency Government has transformed the Smart City program into the Labuha Smart City service through the Halsel Smile and Go-Smile applications. However, Labuha Smart City services focus on the central government area. South Halmahera Regency Government needs to make regional regulations to encourage joint commitment from all elements in implementing accelerated e-Government in island areas.
Keywords: *Smart City Transformation, E-Government Implementation*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah mencanangkan program *E-Government*, bahkan kini mentransformasi program *Smart City* dalam mendorong percepatan Implementasi *E-Government*. Penelitian ini bertujuan menganalisis situasi dan kondisi pelaksanaan E-Government melalui program transformasi *Smart City*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan memahami fenomena publik dalam program transformasi *Smart City*. Analisis data menggunakan teknik Spiral melalui tahapan mengumpulkan data berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi, tahap mengorganisir data, tahap dilakukan penandaan dan pemaknaan data serta tahap deskripsi dan mengklasifikasi data. Berdasarkan analisis data, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah mentransformasi program *Smart City* dalam bentuk layanan *Labuha Smart City* melalui aplikasi Senyum Halsel dan Go-Smile. Untuk mendorong percepatan transformasi *Smart City* dalam implementasi E-Government dibutuhkan komitmen pemerintah dalam penyediaan infrastruktur teknologi dan telekomunikasi di daerah kepulauan lainnya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu membuat peraturan daerah untuk mendorong berkomitmen bersama semua elemen dalam percepatan pelaksanaan *e-Government* di daerah kepulauan.
Kata Kunci: Transformasi Smart City, Implementasi E-Government

Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 1, Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i1.4018

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi mendorong perubahan tata kelola pemerintahan, bahkan pemerintah daerah dituntut mendorong tata kelola pemerintahan dengan mengadaptasi teknologi dan informasi untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dalam bentuk *e-Government* (Taufik et al., 2022). Untuk mendukung tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi terbut pemerintah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government.* Penerapan *e-Government* dalam tata kelola pemerintahan daerah karena memiliki banyak manfaat yang memungkinkan bagi masyarakat, dunia usaha, dan entitas pemerintah untuk mengakses informasi pemerintah yang tersedia tanpa batas waktu (Alshehri & Drew, 2010; Suhardi et al., 2015). Selain itu kehadiran *e-Government* dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas transaksi yang dapat mengurangi dan meminimalkan potensi penyimpangan dan pelanggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien (Choi et al., 2016; Prakosa & Rindiana, 2023; Taufik et al., 2022).

Para ahli mengungkapkan pada dasarnya *e-Government* merupakan pemanfaatan perangkat teknologi dan informasi seperti komputer dan internet untuk melayani warga negara secara efektif, efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab serta mewujudkan hubungan warga negara, pelaku bisnis dan pemerintah. (Al-Shboul et al., 2014; Atmojo & Nurwulan, 2020; World Bank, 2015). Selain itu salah satu syarat penerapan *e-Government* perlu dukungan infrastruktur teknologi dan informasi yang memadai (Indrajit, 2016).

Oleh karena itu, penerapan *e-Government* tidak hanya sekedar pengalihan kerja pemerintah yang bersifat manual menuju kerja komputerisasi, namun pada hakekatnya pelaksanaan *e-Government* sebagai bentuk kerja birokrasi yang dinamis dan mampu beradaptasi perkembangan teknologi informasi yang semakin maju (Zulhakim, 2012). Selain itu, *e-Government* merupakan strategi baru yang dibakukan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi dan informasi

Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 1, Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i1.4018

untuk memberikan melayani dan kemudahan kepada masyarakat umum serta memberikan peluang kepada publik untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui akses teknologi dan informasi.

Akan tetapi penerapan *e-Government* di level lokal juga memiliki tantangan sendiri, ditemukan pelaksanaan *e-government* di beberapa daerah mengalami kegagalan bahkan kegagalan tersebut menjadi gejala umum yang dirasakan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia dan berada pada level paling terendah (Suhardi et al., 2015). Namun secara garis besar, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan e-Government lebih banyak berhubungan dengan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kerja dan kedua ketersediaan Sumber Daya manusia khususnya dibidang Informasi dan teknologi. (Atmojo & Nurwulan, 2020; Risnandar, 2014).

Sama halnya juga dalam menerapkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Maluku Tengah juga menemukan beberapa hambatan terkait dengan kebijakan/regulasi, perencanaan dan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur Teknologi Informasi, maka untuk mendorong (Adu et al., 2022).

Setidaknya kondisi tersebut dialami dalam pelaksanaan mengembangkan program *e-Government* di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang mengembangkan program *e-Government* sejak tahun 2007, namun dalam pelaksanaan masih dinilai rendah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam pelaksanaan *e-Government* masih fokuskan pada program dan kebijakan yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat sebagai bentuk sinergitas program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seperti Program Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui sistem OSS *(Online Single Submissions),* Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, sistem perencanaan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sebelumnya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Sebagian layanan publik seperti layanan e-kependudukan diberikan

dengan menggunakan media sosial *(WhatsApp)* karena adanya distribusi infrastruktur teknologi dan informasi belum merata, terbatasnya dukungan anggaran, kurangnya sumber daya terampil, serta terbatasnya pasokan jaringan listrik di daerah pulau kecil, kurangnya pelatihan dan transformasi pengetahuan bagi aparatur pemerintah yang mengelola perangkat teknologi informasi, terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi serta rendahnya sosialisasi program e-Government dan belum optimalnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (Hafel et al., 2022).

Selain itu, pelaksanaan program *e-Government* tidak dilakukan secara integral dan hanya dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan tugas dan kewenangan. Kondisi tersebut karena pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam melaksanakan program *e-Government* terkendala kondisi geografis yang berciri kepulauan, dimana daerah yang berciri kepulauan memiliki keterbatasan dukungan infrastruktur informasi, komunikasi dan keterbatasan transportasi antar pulau serta ketersediaan sumberdaya yang tidak merata (Madubun et al., 2017; Rahmatunnisa et al., 2018).

Kondisi geografis daerah kepulauan memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi informasi juga menghambat layanan publik terutama layanan administrasi kependudukan (Suleman, 2019). Berangkat dari pelaksanaan *e-Government* yang belum optimal maka dilakukan evaluasi dan dinyatakan pelaksanaan *e-Government* melalui pengukuran tingkat kematangan dinilai sangat rendah karena kurangnya strategis pemanfaatan teknologi dan Informasi dan belum patuh pada standar operasional penggunaan Teknologi informasi komunikasi serta perlu adanya perbaikan layanan dan keamanan sehingga untuk mempercepat pelaksanaan *e-Government* perlu strategi untuk mendorong percepatan pelaksanaan *e-Government* (Hasan & Arief, 2018).

Strategi baru dalam pelaksanaan *e-Government* dengan melakukan transformasi program *Smart City* yang diharapkan dapat mempercepat implementasi *e-Government.* Dimana Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2022 ikut bergabung

dalam program Gerakan Menuju Kota Cerdas *(Smart City)* yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Republik Indonesia dengan tujuan untuk membimbing pemerintah daerah dalam menyusun rencana induk smart city agar dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dalam mendorong peningkatan layanan publik dengan mengakselerasi potensi yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah.

Transformasi *Smart City* melalui program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City), dinilai akan mempercepat pelaksanaan e-government di Kabupaten Halmahera Selatan Sebab salah satu karakteristik *Smart City* dapat mendorong suatu kota yang mempunyai infrastruktur jaringan yang memungkinkan terciptanya pengembangan kota baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan kota yang lebih baik untuk masa depan (Ferza et al., 2022).

Selain *Smart City* merupakan konsep pengelolaan kota yang berbasis pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga transformasi suatu kota yang sebelumnya dikelola secara tradisonal menjadi kota cerdas dan efisien melalui pemanfaatan berbagai sumber daya teknologi dan informasi, serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kehidupan masyarakat kota (Nurzaman et al., 2023; Pratama, 2014; Wahyudi et al., 2022).

Berdasarkan argumentasi teoretik dan empirik di atas, maka penelitian dilakukan untuk menganalisis situasi dan kondisi pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai salah satu kabupaten dengan karakteristik sebagai daerah kepulauan yang melakukan transformasi program Gerakan Menuju Kota Cerdas *(Smart City)* untuk mendorong percepatan e-government serta kendala dan hambatan yang dihadapi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, alasan menggunakan jenis kualitatif untuk menganalisis dan memahami fenomena publik dalam implementasi program *e-Government* melalui transformasi program gerakan *Smart City* di Kabupaten Halmahera Selatan, sebab pada dasarnya jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap dan

Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 1, Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i1.4018

memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui (Strauss & Corbin, 2009). Untuk memperoleh data peneliti menggunakan instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan *Non-Government Organization* (NGO.

Analisis data mengacu pada model analisis Spiral yang dikembangkan Creswell (2007) dengan mengacu pada beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan penentuan jenis data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumen dan observasi untuk menyesuaikan dengan masalah yang diteliti. Tahap kedua dilakukan manajemen data dengan mengorganisir data yang dikumpulkan yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Tahap ketiga dilakukan penandaan dan pemaknaan terseleksi terhadap keseluruhan data dengan membuat catatan atau frasa singkat yang menjadi kunci untuk memahami data yang diperoleh. Tahap keempat dilakukan deskripsi dan mengklasifikasi melalui kondensasi data dalam bentuk penilaian dan interpretasi untuk membentuk tema, kategori yang selanjutnya dihubungkan dengan teori yang disajikan dalam pembahasan hasil penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Smart City Dalam Implementasi E-Government

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sejak tahun 2007 melaksanakan program *e-Government*, Secara umum, implementasi *e-Government* di Kabupaten Halmahera Selatan masih berhubungan dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah di tingkat lokal sebagai bentuk sinergitas program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Program *e-Government* yang dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan antara lain Program Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui sistem OSS *(Online Single Submissions)*, Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, sistem perencanaan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sebelumnya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Serta layanan e-Kependudukan.

Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 1, Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i1.4018

Namun layanan *online* e-kependudukan meliputi layanan e-KTP dan Kartu Keluarga, layanan Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Kematian (SKK) dengan menggunakan media sosial (WhatsApp) namun program tersebut masih terbatas dan hanya dilaksanakan di 11 kecamatan dari total 30 kecamatan karena keterbatasan jaringan telekomunikasi. Oleh karena kondisi geografis yang terisolasi dan keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi sangat mempengaruhi rendahnya kualitas layanan kependudukan elektronik di Kabupaten Halmahera Selatan (Suleman, 2019).

Pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Halmahera Selatan juga dilakukan secara parsial yang dikerjakan masing-masing satuan kerja perangkat daerah sehingga tidak terjadi integrasi sistem antar organisasi perangkat daerah sehingga tidak memberikan optimalisasi dalam implementasi *e-Government.* Selain itu rendahnya sosialisasi program *e-Government* dan belum optimalnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan e-Government hanya dikerjakan oleh organisasi perangkat daerah tertentu saja (Hafel et al., 2022). Walaupun diakui kendala integrasi sistem dalam penyelenggaraan masih menjadi permasalahan di daerah yang melaksanakan program *e-Government* sehingga perlu perhatian dan perbaikan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *e-Government* (Adu et al., 2022).

Sementara itu, berdasarkan evaluasi pelaksanaan *e-Government* melalui pengukuran tingkat kematangan pelaksanaan *e-Government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sangat rendah karena kurangnya strategis pemanfaatan teknologi dan Informasi sehingga dibutuhkan strategi yang dapat meningkatkan kematangan implementasi *e-Government* di Kabupaten Halmahera, Selatan salah satunya pada standar operasional penggunaan Teknologi informasi komunikasi serta perlu adanya perbaikan layanan dan keamanan (Hasan & Arief, 2018).

Maka itu, salah satu strategi untuk mempercepat pelaksanaan *e-Government* dengan melakukan transformasi program *Smart City* yang diharapkan dapat mempercepat

Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 1, Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i1.4018

implementasi *e-Government.* Hal tersebut karena Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2022 ikut bergabung dalam program Gerakan Menuju Kota Cerdas *(Smart City)* yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Republik Indonesia. Program gerakan menuju kota cerdas ini bertujuan untuk membimbing pemerintah daerah dalam menyusun rencana induk *Smart City* agar dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dalam mendorong peningkatan layanan publik dengan mengakselerasi potensi yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah.

Setidaknya terdapat enam dimensi yang ditetapkan pemerintah dalam mendorong program gerakan menuju kota cerdas *(smart city)* yakni *Smart Governance, Smart Branding, Smart Living, Smart society, Smart Economy* dan *Smart Environment*. Secara umum enam dimensi *Smart City* memberikan fokus dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dengan mengandalkan teknologi informasi yang dioperasikan dalam bentuk aplikasi sistem elektronik layanan.

Secara operasionalisasi enam dimensi *Smart City* sebagaimana *Smart Governance* mendorong tata kelola pemerintahan yang transformatif dan beradaptasi lebih cepat untuk menyesuaikan kebutuhan layanan publik melalui teknologi dan informasi dalam bentuk digitalisasi layanan.

Sementara *Smart Branding* bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor pariwisata yang dipromosikan melalui teknologi informasi. *Smart living* bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan dan mempermudah aksesibilitas masyarakat melalui kelayakan modal transportasi untuk mendukung mobilisasi barang dan jasa melalui teknologi informasi. Sedangkan *Smart society* mendorong masyarakat yang smart yang mewujudkan masyarakat humanis, dan dinamis baik untuk terciptanya masyarakat produktif.

Smart Economy bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal. *Smart environment* bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan ketahanan lingkungan serta mendorong

Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 1, Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i1.4018

daya saing energi yang berkelanjutan (Kumorotomo, 2022; Pengestu et al., 2021; Rahmawati et al., 2018).

Dari sasaran yang diungkapkan di atas, maka setidaknya enam dimensi *Smart City* dapat digambarkan sebagai berikut.

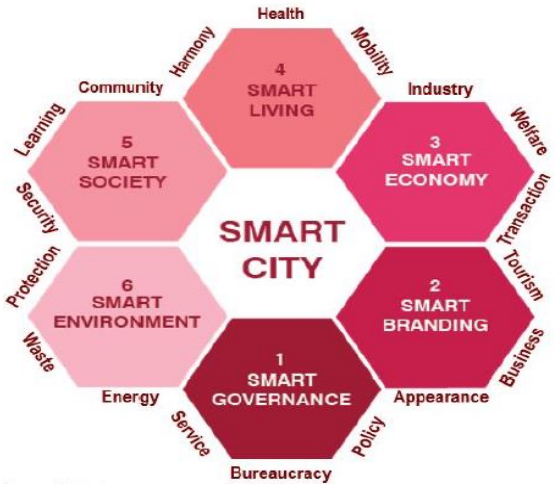

Gambar 1: Enam Dimensi Smart City
Sumber: Adaptasi dari Kumorotomo (2022), Rahmawati et al (2018).

Dalam implementasi *Smart City*, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengadopsi dimensi-dimensi *Smart City* yang diakselerasi dalam aplikasi Labuha *Smart City* dengan tujuan untuk mendorong layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam implementasi *Smart City* mengutamakan pada dimensi *Smart Government* untuk mendorong pelayanan publik dan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan (Nurzaman et al., 2023).

Terdapat dua layanan utama dalam transformasi Smart City sebagai mendorong implementasi *e-Government* dalam bentuk *Labuha Smart City*, pertama sistem elektronik layanan umum yang disingkat Senyum Halsel berhubungan dengan layanan publik pemerintah Halmahera Selatan kepada masyarakat Halmahera Selatan diantaranya layanan kependudukan elektronik, layanan pajak online, layanan izin usaha online, layanan kesehatan, layanan, layanan lapor yang dapat dilakukan masyakat kepada masyarakat. Kedua, aplikasi *Go-Smile* yang merupakan sistem manajemen informasi lembaga secara elektronik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yaitu suatu aplikasi yang digunakan di lingkungan pemerintahan untuk tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini sifatnya untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari aplikasi absensi pegawai secara online, LPSE dan menu lainnya.

Transformasi *Smart City* dilakukan dalam rangka untuk

Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 1, Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i1.4018

melakukan sinkronisasi data yang memungkinkan berbagai sistem, perangkat, dan platform yang digunakan dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan berbagi, mengintegrasikan, dan mengelola data dengan efisien dengan tujuan utama untuk menciptakan ekosistem yang terhubung dan memungkinkan berbagai entitas, termasuk pemerintah, perusahaan swasta, dan warga masyarakat, agar mudah mengakses, berbagi, dan menganalisis data yang relevan dengan cara yang aman dan efektif.

Oleh karena itu pelaksanaan program *Smart City* dalam aplikasi sistem elektronik layanan umum yang semuanya dirancang Dinas Komunikasi dan Informasi (Disinfokom) Kabupaten Halmahera Selatan untuk memenuhi pelaksanaan *e-Government* melalui program *Smart City*.

Berikut aplikasi *Labuha Smart City* yang dikelola Disinfokom.

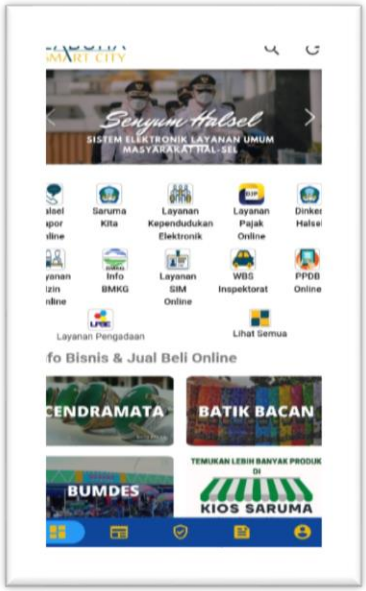

Gambar 2: Aplikasi Labuha Smart City
Sumber: diadaptasi dari https://smart.halmaheraselatankab.go.id/

Kendala dan Hambatan Transformasi Smart City dalam E-Government

Transformasi program *Smart City* untuk mendorong percepatan *implementasi e-Government* di Kabupaten Halmahera Selatan belum menjangkau seluruh masyarakat yang berada di daerah pulau maupun organisasi pemerintah daerah. Hal tersebut karena wilayah Kabupaten Halmahera Selatan belum seluruhnya memiliki infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi sehingga jangkauan layanan masih di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memadai. Tercatat di komplek Kantor Bupati

Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 1, Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i1.4018

masih terhubung dengan jaringan *backbone*, selain itu jaringan serat-optik (FO) yang dikembangkan sendiri Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Halmahera Selatan dimanfaatkan untuk menghubungkan beberapa OPD strategis. Oleh karena itu, setidaknya persoalan suprastruktur dalam transformasi *Smart City* dalam pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Halmahera Selatan meliputi infrastruktur jaringan, infrastruktur aplikasi dan infrastruktur informasi.

Penyiapan sumberdaya manusia dalam pengelolaan program *Smart City* juga masih menjadi permasalahan. Berdasarkan data Badan kepegawaian Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 tercatat sebanyak 4.172 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum dilakukan Analisis Beban Kerja sehingga distribusi tenaga administrasi dalam pengelolaan Smart City belum merata. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri dalam implementasi *e-Government* selain faktor mobilisasi sumberdaya keuangan, infrastruktur Teknologi dan Informasi dan peningkatan kemampuan aparatur dibidang ITC juga faktor sosial politik yang berkaitan dengan kemampuan politik untuk menjalankan e-government (Nabafu & Maiga, 2012; Shannak, 2013).

Berdasarkan observasi dan analisis data, ditemukan proses implementasinya e-Government melalui transformasi *smart city* belum optimal untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat yang berada di daerah pulau, bahkan kini layanan smart city masih dipusatkan di wilayah pulau Bacan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan. Kondisi tersebut karena Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri 90 pulau berpenghuni masih memiliki kendala pemerataan penyebaran infrastruktur teknologi informasi. Tercatat pada tahun 2022 sebagai bentuk penguatan infrastruktur *Smart-City* pemerintah melakukan pengadaan 177 BTS namun berdasarkan hasil observasi masih temukan desa di Kabupaten Halmahera Selatan yang belum memiliki jaringan telekomunikasi.

Keterbatasan infrastruktur teknologi dan informasi menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi daerah berciri kepulauan di Indonesia karena memiliki kendala dalam pemerataan

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta keterbatasan transportasi antar pulau (Madubun et al., 2017; Rahmatunnisa et al., 2018). Keterbatas infrastruktur tersebut menimbulkan sikap apatis dari masyarakat sehingga menjadi penghambat pelaksnaan *Smart City* secara merata. yang menyatakan kelemahan pada aspek *Smart Governance* mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sebagai modal sosial dari bekerjanya aspek *Smart People* (Handayani et al., 2021).

Hal ini sejalan dengan pendapat mengungkapkan salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan *Smart City* karena masih ditemukan sikap apatis masyarakat terhadap sistem-sistem yang dibuat pemerintah (Ramadhani & Handoyo, 2022). Selain itu salah satu keberhasilan pelaksanaan e-Government terkait dengan komitmen bersama dari unsur pemerintah dalam mengimplementasikan *e-Government* (Wulandari & Salomo, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah daerah belum memiliki kemauan politik terkait kepastian dari pemerintah terkait penguatan hukum yang mendukung dalam proses pelaksanaan *e-Government* sehingga dapat mengikat semua elemen dalam satu komitmen untuk melaksanakan e-government. Bahkan Pemerintah Halmahera Selatan juga belum memiliki arah kebijakan serta standar operasional yang mengatur keberlangsungan transformasi *Smart City* dalam pelaksanaan e-government.

Pada dasarnya, variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan *Smart City* diantaranya penyempurnaan Standar dan Sasaran Kebijakan, penguatan Sumber Daya, intensitas komunikasi dan koordinasi antar organisasi dan penguatan Aktivitas, penguatan karakteristik agen pelaksana diantaranya kejelasan pelaksana terkait standar operasional, tugas dan fungsi dari unit pengelola, serta disposisi dalam pelaksanaan program memiliki berkomitmen penuh, selain itu adanya dukungan kondisi sosial, politik dan ekonomi (Ramadhani & Handoyo, 2022).

Selain itu dalam penguatan regulasi pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Halmahera Selatan hanya mengacu para Peraturan Kepala Daerah Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun

2017 Tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan serta regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam layanan publik dengan menggunakan teknologi dan informasi.(Kominfo, 2007).

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pelaksanaan *e-Government* belum diperkuat regulasi yang mengatur sinkronisasi data antar satuan organisasi dan keamanan data yang menimbulkan kecemasan pengguna. Oleh karena itu, proses transformasi program gerakan *Smart City* dalam implementasi *e-Government* perlu mempertimbangkan aspek regulasi lokal dalam bentuk peraturan daerah yang dapat mengatur tentang kemampuan dan komitmen pemerintah dalam melaksanakan *e-Government* sehingga tidak terjadi sikap acuh dari aparatur daerah.

Karena itu, tantangan implementasi *e-Government* dalam pelayanan publik terkait terintegrasi antar unit kerja, maka upaya peningkatan layanan *e-Government* dapat dilakukan melalui penyediaan regulasi pengelolaan *e-Government* sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan *e-Government* yang efisien, transparan, dan aman. Sebab pada prinsipnya aspek regulasi dalam *penerapan e-Government* melibatkan aspek hukum, keamanan informasi, privasi, standar teknis, dan interoperabilitas Suharyana (Suharyana, 2017).

Terdapat tiga implikasi transformasi *Smart City* yang dipraktekkan di beberapa daerah di Indonesia yakni berhubungan dengan sistem satu data yang terintegrasi serta *up to date* dan valid untuk formulasi kebijakan *(data driven policy)*, mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan ke dalam sistem *Citizen Relationship Management* dan terdapat suatu sistem layanan administrasi warga yang terintegrasi (Ramadhani & Handoyo, 2022). Selain keberhasilan pelaksanaan *e-Government* di beberapa kota di Indonesia terkait kebijakan yang diterjemahkan dalam bentuk visi dan misi dalam bentuk suatu dokumen berupa perancangan TIK *(master plan)* tertuang dalam Peraturan Daerah. Pentingnya regulasi yang mengatur TIK tersebut karena perkembangan TIK terus mengalami perubahan dan

Journal of Governance Innovation
Volume 6, Number 1, Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v6i1.4018

kemajuan, maka perlu regulasi untuk mengatur para pegawai yang terlibat dalam proses implementasi *e-Government* (Indrajit, 2016).

Kesimpulan

Sejak awal dilakukan program *e-Government* Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan masih memprioritaskan program dan kebijakan yang berhubungan Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bentuk sinergitas program dengan pertimbangan keterbatasan sarana pendukung *e-Government*. Selain itu program *e-Government* yang dilaksanakan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi maka itu berdasarkan valuasi melalui pengukuran tingkat kematangan pelaksanaan *e-Government* sangat rendah karena kurangnya strategis pemanfaatan teknologi dan Informasi sehingga dibutuhkan strategi yang dapat meningkatkan kematangan implementasi *e-Government.*

Salah satunya melalui transformasi program *Smart City* melalui aplikasi sistem elektronik layanan umum integrasi layanan diantaranya layanan aplikasi absensi pegawai secara online, LPSE, layanan izin usaha secara online dan layanan kependudukan elektronik. Walaupun transformasi *Smart City* telah dilaksanakan namun dengan kondisi geografis Kabupaten Halmahera Selatan sebagai daerah kepulauan menghambat proses percepatan pembangunan percepatan implementasi *e-Government*.

Setidaknya terdapat beberapa kendala diantaranya belum adanya distribusi infrastruktur teknologi dan informasi secara merata di daerah pulau kecil sehingga masih ditemukan daerah yang belum memiliki jaringan telekomunikasi. Belum dilakukan distribusi tenaga dalam pengelolaan *e-Government* secara merata semua daerah sehingga belum terintegrasi data di level pemerintahan dalam proses percepatan implementasi *e-Government*. Maka itu, dibutuhkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah sebagai bentuk penguatan hukum proses yang dapat mendorong komitmen bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat serta stakeholder dalam pelaksanaan *e-Government* di derah kepulauan dengan menyediakan

Referensi

Buku

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches.* (Third Edit). SAGE Publication, Inc.

Strauss, A., & Corbin, J. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Cet.2 (ed.)). Pustaka Pelajar.

Zulhakim, A. (2012). *Mengenal E-Government (Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik)* (1st ed.). Buku Ajar.

Jurnal Dengan DOI

Adu, A. La, Hartanto, R., & Fauziati, S. (2022). Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Pemerintah Daerah. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, *5*(3), 215–223. https://doi.org/10.33387/jiko

Al-Shboul, M., Rababah, O., Al-Shboul, M., Chnemat, Ra., & Al-Saqqa, S. (2014). Challenges and Factors Affecting the Implementation of E-Government in Jordan. *Journal of Software Engineering and Applications*, *7*, 1111–1127. https://doi.org/10.4236/jsea.2014.713098

Atmojo, B. T., & Nurwulan, N. R. (2020). E-Government Global Trends and Future Perspective in Indonesia. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Adminisrasi Negara*, *08*(02), 166–180. https://doi.org/doi.org/10.21831/jnp.v8i2.34855

Choi, H., Park, M. J., Rho, J. J., & Zo, H. (2016). Rethinking the assessment of e-government implementation in developing countries from the perspective of the design–reality gap: Applications in the Indonesian e-procurement system. *Telecommunications Policy*, *40*(7), 644–660. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.03.002

Ferza, R., Pranasari, M. A., Fitri, S. E., Indarti, D. M., & Gunawan, T. (2022). A Gap Analysis of Yogyakarta Smart City Project (within the Dimension of Smart Governance and Smart Economy). *Journal of Governance*, *7*(1), 184–201. https://doi.org/10.31506/jog.v7i1.14127

Hafel, M., Jamil, J., Umasugi, M., & Anfas, A. (2022). Challenges of E-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, *3*, 44–58. https://doi.org/10.31947/jakpp.v8i1.21282

Handayani, D. W., Syafarudin, S., & Muflihah, L. (2021). Problem Realisasi Kebijakan Smart City di Indonesia: Kasus Kota Bandar Lampung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *11*(1), 35–62. https://doi.org/10.15575/jispo.v11i1.10765

Madubun, J., Akib, H., & Jasruddin. (2017). The Prototype Model of Asymmetric Decentralization in

Providing Public Services to the Island Areas. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, *8*(2), 209–217. https://doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n2p209

Nurzaman, R. A., Rompis, A. E., Nurmalasari, E., & Zulfiani, Y. N. (2023). Implementasi E-Government pada Konsep Smart City Pemerintah Kota Bandung dalam Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Journal of Governance Innovation*, *5*(1), 175–192. https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2282

Prakosa, R. M., & Rindiana, I. R. (2023). Analisis Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Bali dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Digital. *Journal of Governance Innovation*, *5*(2), 290–307. https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.2917

Pratama, I. P. A. E. (2014). *Smart City Beserta Cloud Computing dan Teknologi-teknologi Pendukung Lainnya*. Informatika.

Rahmatunnisa, M., Hindersah, R., & Achmad, T. H. (2018). Why Regions with Archipelagic Characteristics in Indonesia Also Need Asymmetric Decentralization? *Jurnal Bina Praja*, *10*(2), 251–261. https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.251-261

Rahmawati, D., Sulistyarso, H., Ariastita, P. G., Yusuf, M., & Paramasatya, D. A. (2018). Smart kampung for Surabaya smart city: Criteria redefined. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *202*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012068

Ramadhani, M. A., & Handoyo, E. (2022). Implementasi Kebijakan Jakarta Smart City dalam Mewujudkan Smart Governance pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. *Unnes Political Science Journal*, *6*(2), 42–47. https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.58254

Shannak, R. O. (2013). The Difficulties and Possibilities of E-Government: The Case of Jordan. *Journal of Management Research*, *5*(2), 189–204. https://doi.org/10.5296/jmr.v5i2.2560

Suhardi, Sofia, A., & Andriyanto, A. (2015). Evaluating e-government and good governance correlation. *Journal of ICT Research and Applications*, *9*(3), 236–262. https://doi.org/10.5614/itbj.ict.res.appl.2015.9.3.3

Suharyana, Y. (2017). Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik Di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, *1*(1), 45–58. https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.5

Taufik, T. H., Sarah, S. W., & Yusuf, Y. A. (2022). Analisis Strategi Keberhasilan E-Government di Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Governance Innovation*, *4*(1), 14–26. https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1116

Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2022). Strategi Implementasi Smart City Kota Bandung. *Jurnal Good Governance*. https://doi.org/10.32834/gg.v18i1.460

Jurnal dan Website

Alshehri, M., & Drew, S. (2010). Implementation of e-Government: Advantages and Challenges. *International Journal Electronic Business*, 79–86. http://www98.griffith.edu.au/dspace/handle/10072/40620%5Cnpapers2://publication/uuid/09E5E6A6-EC7D-4E17-84FB-677189A5AB74

Hasan, A., & Arief, A. (2018). Pengukuran Tingkat Kematangan E-Goverment pada Pemerintah Daerah Kepulauan (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, Indonesia). *Jurnal Protek*, *05*(1), 31–36.

Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. In *Electronic Government*. https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government

Kominfo. (2007). *Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Nasional*. *Versi I*, 1–49.

Kumorotomo, W. (2022). *Teori, Arah Kebijakan, Dan Tatakelola Smart City*. Tim Pembimbing Smart-City Universitas Gadjah Mada – Kominfo. www.ugm.ac.id

Nabafu, R., & Maiga, G. (2012). A Model of Success Factors for Implementing Local E-government in Uganda. *Electronic Journal of E-Government: EJEG; Reading*, *10*(1), 31–46. http://search.proquest.com/docview/1319481486/abstract/936C7AA9AC434DABPQ/12

Pengestu, R. P. A. G., Sudibyo, D. P., & Nugroho, A. R. (2021). Evaluation of Surabaya Smart City Implementation in Realizing Smart Government , Smart Economy , Smart Environment , Smart Living , Smart People , and Smart Mobility. *Incesh*, *581*(Incesh), 320–327.

Risnandar. (2014). Analisis E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, *2*(7), 192–199.

Suleman, S. (2019). Kualitas Pelayanan E-KTP Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, *5*(April), 1–13.

World Bank. (2015). *e-Government*. The world bank. https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government

Wulandari, E. R., & Salomo, R. V. (2021). The Evaluation of Policies and Success Factors of E-Government Parking Tax Implementation in Capital Region of Jakarta. *Jurnal Manajmen Pelayanan Publik*, *IV*(2), 155–176.